



# STRATEGI KOMUNIKASI

Penjangkauan  
Masyarakat di Wilayah  
KPH Kaltim

BOGOR, NOVEMBER 2019

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pengelolaan hutan yang berhasil di tingkat tapak tidak terlepas dari pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal sekitar hutan. Partisipasi (masyarakat lokal) telah dijadikan sebagai salah satu prinsip utama yang melandasi telah berjalannya tata kelola hutan dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Partisipasi masyarakat lokal ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi juga dalam berbagai tingkatan yaitu dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pada tahapan monitoring dan evaluasi tata kelola hutan. Dalam konteks pengelolaan hutan pada level tapak (KPH/Kesatuan Pengelolaan Hutan). Idealnya saat perencanaan rencana pembangunan jangka pengelolaan hutan dalam suatu wilayah KPH, masyarakat terlibat.

Pelibatan masyarakat dalam wilayah KPH menjadi sangat penting, dari aspek strategis, aspek legal formal sebagai penghormatan atas hukum nasional dan internasional yaitu penghormatan atas hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelibatan masyarakat dari aspek teknis juga bahwa keberhasilan pengelolaan akan sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta masyarakat.

Hanya saja bahwa, pelibatan masyarakat dalam perencanaan bahkan sampai pada tahap pengelolaan wilayah KPH tidaklah mudah dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM yang mumpuni, juga karena upaya pelibatan masyarakat lokal memang memerlukan komitmen dan upaya yang kuat. Belum lagi bahwa program penjangkauan masyarakat sampai pada level tapak memerlukan anggaran besar dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Strategi komunikasi mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana menjangkau atau berkomunikasi dengan khalayak sasaran. Tulisan ini akan menguraikan strategi komunikasi untuk penjangkauan masyarakat yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah KPH. Penjangkauan masyarakat juga harus disadari sebagai investasi sosial jangka panjang dan sarana untuk meningkatkan kepemilikan dan tindakan (perilaku) masyarakat lokal atas pengelolaan hutan dalam lingkup wilayah kelola KPH.

## Maksud dan Tujuan

1. Memahami perkembangan KPH di Kalimantan Timur dan peran strategisnya dalam meningkatkan tata kelola hutan yang lebih baik.

2. Memberikan masukan rencana strategi komunikasi penjangkauan masyarakat dalam wilayah KPH dalam rangka mendukung implementasi Program Penurunan emisi 2020-2024 di Kalimantan Timur.

## Beberapa Definsi/Pengertian

**Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

**Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)** adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

**Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)** adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.

**Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)** adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.

**Pengelolaan hutan** adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.

**Pemanfaatan hutan** adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

**Komunikasi** adalah esensi dan dasar dari hal-hal persuasi (seni untuk mempengaruhi), perubahan sikap dan tingkah laku serta sosialisasi melalui transmisi informasi; dimana tujuannya untuk mengidentifikasi, menginformasikan, mempromosikan dan untuk penggarapan lingkungan.

**Strategi Komunikasi** mendefinisikan khalayak sasaran, berbagai tindakan yang akan dilakukan, mengatakan bagaimana khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara lebih efektif.

# PERKEMBANGAN KPH

## Lahirnya KPH

Lahirnya sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan oleh UU nomor 41/1999 pasal 10, 12, dan 17 ayat (1). Konsep dasar dari KPH adalah menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administratif (*forest administrator*) menjadi peran manajerial (*forest manager*) sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014 dalam [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)). Konsep KPH, diharapkan menjadi dasar agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan.

Pembangunan KPH dimaksudkan untuk memastikan adanya pengelola pada tingkat lapangan yang mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan pengelolaan sumber daya hutan secara terintegrasi dan optimal. Kehadiran KPH ini selain akan mampu menjawab persoalan-persoalan pengelolaan hutan seperti *illegal logging* (pembalakan liar), perambahan, kebakaran hutan, diharapkan juga mampu mendorong pengelolaan multi pihak, multi produk, multi fungsi serta mendorong produktivitas bentang alam yang lebih optimal.

Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, menjadi komponen penting dalam menuju keberhasilan pengelolaan hutan di Indonesia. Unit pengelolaan tersebut adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Pembentukan KPH juga diharapkan mampu dijadikan sebagai peluang bagi resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat (Srijono dan Djajono 2010; Syukur 2012 dalam [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)). Dalam konteks ini KPH diharapkan berperan dalam konteks perbaikan tata kelola hutan yang menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat adat/lokal.

## Fungsi dan Peran Strategis KPH

Berdasarkan Permenhut P.6/2010 tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL (lindung) dan KPHP (produksi), maka fungsi kerja KPH dalam kaitannya dengan tata kelola hutan di tingkat tapak adalah:

1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di wilayah KPH.
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH.
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam.
6. Melaksanakan pengelolaan hutan bagi KPH yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan.
8. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan.
9. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

Dengan posisi keberadaan KPH di tingkat tapak serta dengan tugas dan fungsi KPH tersebut, sangat terlihat peran-peran strategis KPH, antara lain:

1. **Optimalisasi akses masyarakat** terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik. Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat, akan memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, untuk sekaligus memosisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat serta saran solusi konflik.
2. **Optimalisasi** potensi melalui **pemanfaatan hutan** (kayu, non kayu, jasa lingkungan, dll) sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat lapangan.
3. Menjadi salah satu wujud nyata bentuk **desentralisasi sektor kehutanan**, karena organisasi KPHL dan KPHP adalah organisasi perangkat daerah.
4. Keberadaan KPH mempunyai nilai strategis bagi kepentingan Nasional, antara lain **mendukung komitmen pemerintah** untuk **menurunkan emisi karbon** dimana sektor kehutanan mempunyai peran yang dominan.
5. Menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, tepat pendanaan.
6. Menjembatani **optimalisasi** pemanfaatan potensi **pendanaan dari hibah luar negeri** di sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
7. Kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, karena **ketersediaan data/informasi** detail tingkat lapangan.
8. Peningkatan keberhasilan **penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi**, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi. Sekaligus akan menjalankan peran penanganan pasca kegiatan seperti: pendataan, pemeliharaan, perlindungan, monev.

Dengan memperhatikan peran strategis yang harus dimainkan serta dalam menjalankan Tupoksi Pengelolaan yang harus diemban KPH. Terlihat bahwa semua aktivitas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, permasalahan-permasalahan kehutanan (sosial, konflik, illegal logging, degradasi lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan lain sebagainya) akan bersentuhan dengan KPH.

Dengan demikian dalam konteks Pengelolaan hutan lestari, Keberadaan KPH akan menjamin keberhasilan kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. **Pertama, untuk kelola sosial.** Khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, akan terjamin masyarakat yang berdaya dan adanya sinergi hutan dan masyarakat yang akan berdampak kepada terjaganya keberadaan dan fungsi hutan.
2. **Kedua, untuk kelola lingkungan.** melalui keberadaan organisasi tapak dapat terjamin keberadaan hutan dari ancaman gangguan keamanan hutan, selanjutnya sinergi dengan masyarakat sekitar hutan akan sangat mendukung proses kelola lingkungan.
3. **Ketiga, untuk kelola ekonomi.** Melalui keberadaan organisasi tapak akan terjamin optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya, dan akan berkembang menuju kemandirian ekonomi yang pada akhirnya akan memandirikan KPH dalam mengelola wilayahnya.

## Perkembangan KPH di Kaltim

Setelah pembentukan provinsi Kalimantan Utara, jumlah KPH di Kaltim yang tadinya sebanyak 30 KPH, menjadi 20 KPH dengan luas 1.078.981 hektar. Dari 20 KPH tersebut, tersisa sembilan unit KPH yang masih belum resmi dibentuk, sementara 11 lainnya telah dilakukan pengelolaan secara bertahap dan berkelanjutan.

Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan pada fungsi pokok hutan yang luasannya dominan. Dari 20 unit KPH yang terdapat di Kaltim, 18 diantaranya merupakan KPH Produksi (KPHP). Sementara, dua lainnya adalah KPH Lindung (KPHL).

Saat ini sudah ada tiga KPH yang berjalan dengan lintas kabupaten/kota dan sudah dibentuk sejak tahun 2011. Tiga KPH ini masing-masing adalah KPH Santan, yang dikelola oleh Pemkab Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Bontang. Kawasan Hutan Santan ini terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 22.360 hektar, hutan produksi seluas 247.129 hektar.

Sementara KPH Meratus dilimpahkan kepada Pemkab PPU, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. KPH Meratus mengelola kawasan hutan produksi seluas 274.420 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 113.329 hektar dengan total wilayah seluas 387.749 hektar.

Pemkab PPU, Paser dan Kutai Barat menjadi penanggungjawab KPH Bongan yang mengelola kawasan hutan lindung seluas 31.951 hektar, hutan produksi seluas 225.217 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 164.575 hektar.

## Peran Masyarakat Dalam KPH

Partisipasi para pihak menjadi bagian penting dalam pembangunan KPH. "Para pihak" merupakan pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH. Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan. Tata kelola hutan (*forest governance*) yang perlu ditingkatkan mulai dari tingkat tapak, dapat bermula dari KPH.

Peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak sangat strategis dan penting. Keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat agar KPH bisa berhasil dalam perencanaan dan pengelolaannya. Beberapa wilayah KPH di Kalimantan Timur dari sisi aspek kelola sosial telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Beberapa contoh pengelolaan KPH dengan melibatkan masyarakat diuraikan sebagai berikut.

Dalam wilayah kerja KPH DAS (Daerah Aliran Sungai) Belayan di Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat inisiatif masyarakat sekitar Danau Siran dalam upaya melindungi hutan gambut Mahakam Tengah, serta menggali berbagai ide pengelolaan kawasan dan peluang usaha ekonomi di dalam KPH. Beberapa aspek pengelolaan misalnya pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa pemanfaatan sarang burung walet dan perikanan air tawar dalam wilayah danau.

Dalam wilayah KPHL Balikpapan dan KPHP Bongan, terdapat pengelolaan hutan tropis dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Alam jasa lingkungan air dan wisata pendidikan lingkungan di area Hutan Lindung Sungai Wain dan Bukit Bangkirai. Pelibatan masyarakat lokal dan umum dalam bentuk pemanfaatan dan pengelolaan, bahkan perlindungan jangka panjang wilayah dengan melakukan monitoring pengamanan hutan dan kegiatan rehabilitasi dalam bentuk kegiatan adopsi dan penanaman pohon.

KPH Model Berau Barat di Kabupaten Berau merupakan salah satu KPH yang mendukung implementasi Program Karbon Hutan Berau yaitu program penurunan emisi berbasis masyarakat di Kabupaten Berau. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya di sekitar Kampung penghasil madu alam di Kecamatan Kelay, KPH bekerjasama dengan mitra pembangunan melaksanakan berbagai pelatihan pengelolaan dan pemasaran madu hutan, pengembangan wisata alam berupa

pengelolaan Danau Nyadeng dan Hutan Desa di Kampung Merabu, pengelolaan dan pengembangan perkebunan karet di Long Duhung dan Sido Bangen, dan sebagainya.

Banyak inisiatif lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan yang telah difasilitasi oleh KPH, tetapi yang menjadi catatan besarnya bahwa keberhasilan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program KPH sangat didukung oleh kelembagaan atau unit manajemen KPH. Selalu akan ada tantangan internal dan eksternal untuk mewujudkan peran strategis KPH sebagai Organisasi Tapak. Jadi selain kelembagaan KPH yang juga harus kuat, KPH juga memerlukan dukungan kuat para pihak. Oleh sebab itu sinergi dan sinkronisasi dengan pembangunan sektor lain menjadi keharusan agar KPH berjalan lebih efisien dan efektif.

## STRATEGI KOMUNIKASI

### Khalayak dan Target Sasaran

Ruang lingkup masyarakat khalayak yang perlu dijangkau yaitu masyarakat yang hidup di sekitar wilayah KPH di Kalimantan Timur. Baik masyarakat yang hidupnya tergantung langsung dengan hutan maupun masyarakat di luar kawasan yang memanfaatkan jasa lingkungan dari hutan sekitar wilayah KPH.

Target sasaran strategi komunikasi dalam wilayah KPH ini terdiri dari 3 sasaran yaitu sasaran 1) pengetahuan, 2) sikap, dan 3) perilaku. Sasaran pertama, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai KPH; sasaran kedua yaitu sasaran sikap masyarakat sekitar mendukung pengelolaan dan program KPH, serta sasaran ketiga yaitu sasaran perilaku yaitu masyarakat aktif terlibat dalam program dan kegiatan KPH.

Inisiatif membuat perencanaan kampung yang selaras iklim, menyusun tata ruang wilayah yang sejalan dengan pembangunan hijau adalah salah satu tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Contoh perubahan perilaku lainnya dalam menjaga kelestarian hutan masyarakat melakukan monitoring pengamanan hutan, terlibat dalam kegiatan pemadaman api, memanfaatkan atau mengelola hasil hutan non kayu secara lestari, dan sebagainya.

### Asumsi Perubahan Perilaku

Strategi komunikasi untuk penjangkauan masyarakat yang dirancang secara khusus dan terorganisir, akan membuat perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku pada



kelompok sasaran. Asumsi-asumsi yang mendasari perubahan ini diuraikan dalam beberapa point pernyataan sebagai berikut:

- Dengan menggunakan saluran komunikasi dan penyampaian pesan yang intensif dan kreatif akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman audiens mengenai KPH di Kalimantan Timur.
- Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai KPH ini akan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya dukungan terhadap pengelolaan wilayah KPH.
- Dengan meningkatnya pengetahuan diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan pengelolaan hutan yang baik ini menjadi peluang bagi pemberdayaan masyarakat lokal.
- Perubahan perilaku masyarakat dalam wilayah KPH dapat terjadi jika ada motivator atau penggerak di tingkat komunitas pada berbagai level sehingga kendala lemahnya pengetahuan dan kurangnya informasi dapat diisi oleh para motivator atau penggerak tersebut.
- Dengan menggunakan saluran informasi yang tepat dan pesan dikemas dengan baik, maka informasi kepada masyarakat akan dapat sampai dengan baik.
- Penjangkauan dan penyadartahuan masyarakat terhadap tentang KPH dan peran strategisnya dalam pengelolaan hutan, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
- Perubahan perilaku di masyarakat agar terlibat dalam program KPH dapat terjadi dengan memperlihatkan bahwa mengambil tindakan untuk penyelamatan hutan tidaklah sulit dan ternyata bisa mendapatkan manfaat (benefit) bagi daerah atau wilayahnya.
- KPH memiliki tanggung jawab sosial mendukung upaya-upaya pelestarian kawasan konservasi hutan dan pembinaan masyarakat. Pengelolaan KPH yang baik dengan melibatkan masyarakat akan jauh lebih berhasil dan efektif.

## Pesan Kunci

Dalam menjangkau masyarakat, informasi dasar yang perlu disampaikan kepada masyarakat yaitu apa KPH, mengapa KPH ada, apa program kerjanya dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari, dan bagaimana masyarakat bisa terlibat. Pesan kunci yang ingin disampaikan ke masyarakat pada dasarnya bahwa dengan kehadiran KPH di suatu wilayah menjadi jawaban pengelolaan hutan akan lebih efisien, hutan lestari dan masyarakat berdaya.

Pesan spesifik lainnya yang ingin disampaikan oleh KPH di setiap wilayah akan sangat tergantung kepada tujuan dan bentuk perilaku apa yang diharapkan diperoleh dari masyarakat dalam konteks pengelolaan dan pengembangan KPH. Dalam konteks implementasi Program Penurunan Emisi, KPH bisa menyusun suatu pesan kunci

bahwa KPH berperan penting dan akan berpartisipasi penuh dalam penurunan emisi karbon di Kaltim. KPH mendukung program Pemerintah Indonesia untuk menurunkan gas rumah kaca. Dan keberhasilan pengelolaan hutan oleh KPH, sangat ditentukan dukungan dan peran serta aktif masyarakat lokal.

## Strategi Komunikasi

Banyak strategi dan media yang bisa digunakan untuk menjangkau masyarakat, tetapi strategi dan media yang paling efektif adalah yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan target publik yang disasar.

Jika konteks masyarakat di pedesaan/kampung di Kalimantan Timur beberapa strategi yang efektif yang bisa diadaptasi dan telah dilakukan oleh beberapa KPH yaitu:

1. KPH terlibat dalam proses perencanaan desa, kecamatan atau kabupaten (Musrembang tahunan). Proses perencanaan akan mendorong sinergi program dari awal dan ajang membuka jejaring dan komunikasi.
2. Sinergitas program dan kegiatan dengan mitra pembangunan lokal (misalnya LSM, swasta) yang bekerja di wilayah KPH.
3. KPH terlibat dalam kegiatan yang penggalian potensi kampung misalnya melalui kegiatan penggalian potensi desa atau PRA (*Participatory Rural Apraisal*) dan kegiatan perencanaan tata ruang dan tata batas wilayah desa/kampung.
4. KPH terlibat dalam kegiatan formil desa/kampung seperti pertemuan adat kampung, kegiatan Pesta Adat atau Pesta Budaya Tahunan, dsbnya. Kegiatan formil dan informal dalam kegiatan penjangkauan masyarakat sangat efektif membangun kedekatan dan hubungan yang lebih cair dan bersahabat.
5. Membantu pengembangan kapasitas melalui berbagai program seperti pelatihan, studi banding, pilot project pengembangan hasil hutan non kayu, dan sebagainya.
6. Membuka akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan serta pengembangan jasa lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan, pengembangan wisata alam dan pengembangan hasil hutan non kayu (sesuai karakteristik dan potensi wilayah) dalam wilayah KPH, dan lain-lain.

## Media Komunikasi

Media yang efektif untuk pendidikan konservasi (“penjangkauan masyarakat”) adalah media yang dirancang berdasarkan preferensi masyarakat, diujicobakan dan diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat. Media preferensi masyarakat kampung dengan tingkat pendidikan rendah yaitu media yang bersifat visual dan menghibur serta media komunikasi kelompok (Tandi Bunna, 2010).

Dalam penjangkauan masyarakat di wilayah KPH, media komunikasi yang bisa digunakan yang bersifat visual dan menghibur seperti poster, kalender, kaos, stiker, lagu konservasi, pagelaran tarian, dan sebagainya. Media lainnya yaitu media komunikasi kelompok misalnya rapat kampung, panggung boneka, festival pesta panen, kegiatan budaya dan sebagainya. Media komunikasi yang sudah ada di masyarakat sedapat mungkin bisa dipakai dalam menyampaikan pesan. Jika memungkinkan menggunakan media sosial karena kampung/desa telah memiliki jaringan internet, maka media ini pun akan sangat efektif untuk penyampai pesan-pesan konservasi KPH.

Karakteristik media yang efektif bagi masyarakat adalah media yang memiliki ilustrasi dan disain yang sederhana dengan tampilan pesan yang singkat, disertai maskot (misalnya hewan atau tanaman khas tertentu) dan pesan yang kuat, bersifat menghibur, eksklusif, ada kedekatan isi pesan dengan masyarakat target/sasaran, serta disampaikan berulang-ulang. Pesan yang ingin disampaikan oleh KPH melalui pesannya tentu saja sangat erat kaitannya dengan persepsi apa yang ingin dibangun dan ingin diketahui oleh masyarakat mengenai KPH tersebut.

Strategi distribusi media yang efektif yaitu disertai penjelasan, disampaikan pada waktu dan tempat yang tepat (d disesuaikan dengan kegiatan harian, bulanan atau tahunan masyarakat), serta melibatkan masyarakat dalam distribusi atau implementasinya. Penyampaian pesan yang efektif lainnya misalnya dengan menggunakan tokoh lokal yang dipercaya (tokoh adat, pendeta, ustad) dan pada saat yang tepat, maka pesan bisa diterima dengan baik.

Apapun media komunikasi yang digunakan intinya bahwa pesan dalam komunikasi tercapai dan efektif. Kriteria komunikasi yang efektif yaitu jika terjadi pengertian, menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan perubahan perilaku. Media hanya alat, yang paling terpenting bahwa pesan apa KPH diketahui, pengelolaan wilayah KPH mendapatkan dukungan dan terjadi perubahan perilaku sehingga masyarakat terlibat di dalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dan disarankan terkait dengan strategi komunikasi penjangkauan masyarakat di wilayah KPH di Kalimantan Timur yaitu:

1. KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak perlu membangun suatu strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat di sekitar wilayah KPH mengetahui, mendukung dan terlibat dalam program KPH.

2. Dalam membangun strategi komunikasi yang efektif, KPH bisa bekerjasama dengan berbagai pihak (mitra pembangunan), membangun sinergitas program dan terlibat dalam program pembangunan desa/kampung.
3. Dalam konteks Program Penurunan emisi, KPH bisa membangun pesan kunci peran kunci KPH sebagai bagian terpenting dari upaya target penurunan emisi karbon hutan di Kaltim.
4. Banyak saluran atau media komunikasi yang bisa dimanfaatkan KPH dalam penyampaian pesan kepada masyarakat. Media yang paling efektif yaitu media yang sesuai preferensi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan KPH.
5. Indikator keberhasilan strategi komunikasi penjangkauan masyarakat yaitu ketika masyarakat mendukung dan perilakunya berubah terlibat dalam program kerja KPH di Kaltim.

## DAFTAR BACAAN

Rahmadani, Fazrin; dkk. 2018. Rancangan Strategi untuk Mempromosikan Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (termasuk pelibatan masyarakat, penilaian dampak, sosial dan lingkungan, dan GRM). Forest Investment Program II (FIP), KLHK. Jakarta.

Subekti, Alfian; dkk. 2018. Roadmap (Peta Jalan) Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalimantan Timur Menuju Kemandirian Tahun 2018-2028. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.

Tandi Bunna, Agustina 2010. Desain Media Komunikasi untuk Pendidikan Konservasi Berdasarkan Preferensi Masyarakat dan Efeknya terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat di Kawasan Lindung Sungai Lesan, Berau, Kalimantan Timur (Tesis). Institut Pertanian Bogor. Bogor.

<https://pakarkomunikasi.com/teori-strategi-komunikasi>.

<https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>.

<https://kphlampang.wordpress.com/2015/06/18/jenis-jenis-kph/>.

<http://agroindonesia.co.id/2018/03/peran-strategis-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>.

<https://kaltimprov.go.id/berita/pembentukan-kph-di-kaltim-terus-diperbanyak>.